OPEN ACCESS
JWLP: Jurnal Wahana Literasi Pendidikan
Vol. 1 No. 5, September 2026, Hal. 670-684
e-ISSN. 3124-2820
DOI. https://doi.org/10.58472/jwlp.v1i5.506
Research Article

Peran Kepala Madrasah Sebagai Manajer dalam Optimalisasi Pembelajaran Melalui Sistem Pemisahan Gender siswa dan Tenaga Pendidik di MA Al-Khoirot

Alfin Nuris Sa'adah[1], Muhammad Husni[2]
[1] Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
[2] Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Corresponding Author:
Alfin Nuris S'adah, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
Email: alfinnurissa'adah25@pasca.alqolam.ac.id

Abstract
This study aims to analyze the managerial role of the madrasah principal in optimizing the learning process through the implementation of a gender-segregated education system (single-sex classroom) for students and teaching staff at MA Al-Khoirot. This policy is implemented as a preventive response to adolescent moral degradation while simultaneously serving as an effort to enhance the effectiveness of the learning environment. The research method employed is a qualitative approach utilizing library research integrated with a field case study. Primary data collection was conducted through semi-structured interviews with key informants, while secondary data was gathered through documentary study. The results of the study indicate three main findings. First, the planning phase carried out by the madrasah principal is integrative-structural, aligning with the master regulations set by the Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot, with a primary focus on mapping separate student groups (rombongan belajar) and arranging the distribution of teachers' teaching hours. Second, the organization is implemented in the form of absolute segregation (100%) through the geographical separation of the boys' and girls' areas, a dualistic/parallel administrative staff structure, and teacher placement based on a role modeling approach. Third, the optimization of learning quality is achieved through grouping by specialization or major (Natural Sciences/IPA, Social Sciences/IPS, and Islamic Studies/Keagamaan) based on students' objective academic scores, alongside strengthening the coordination of a single standardized curriculum through the internal Subject Teacher Forum (MGMP) and the functional line of the Vice Principal of Curriculum. This study concludes that systematic managerial intervention is capable of establishing a focused learning ecosystem, minimizing non-educational interaction distractions, and maintaining the academic quality and character of students in a balanced manner.

Keywords: *Managerial Role, Principal, Gender Segregation*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajerial kepala madrasah dalam mengoptimalkan proses pembelajaran melalui implementasi sistem pemisahan gender *(single-sex classroom)* bagi siswa dan tenaga pendidik di MA Al-Khoirot. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons preventif terhadap degradasi moral remaja sekaligus sebagai upaya peningkatan efektivitas lingkungan belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan *(library research)* yang diintegrasikan melalui studi kasus lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara semistruktur bersama informan kunci, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, tahap

perencanaan yang dilakukan kepala madrasah bersifat integratif-struktural yang merujuk pada regulasi induk Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot dengan fokus pada pemetaan rombongan belajar secara terpisah dan penataan distribusi jam mengajar guru. Kedua, pengorganisasian diimplementasikan dalam bentuk segregasi mutlak (100%) dengan pemisahan geografis kawasan putra dan putri, struktur tata usaha dualistik/paralel, serta penempatan guru berbasis pendekatan role modeling. Ketiga, optimalisasi mutu pembelajaran dicapai melalui pengelompokan peminatan atau jurusan (IPA, IPS, dan Keagamaan) berbasis nilai akademik objektif siswa, serta penguatan koordinasi standardisasi kurikulum tunggal melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal dan jajaran fungsional Waka Kurikulum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi manajerial yang sistematis mampu mewujudkan ekosistem belajar yang fokus, meminimalkan distraksi interaksi non-edukatif, serta mempertahankan mutu akademik dan karakter peserta didik secara seimbang.

Kata Kunci: Peran Manajerial, Kepala Madrasah, Pemisahan Gender

PENDAHULUAN

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di lembaga yang dipimpinnya. Keberhasilan pencapaian tujuan madrasah tidak terlepas dari kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, yang meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Keempat fungsi tersebut menjadi landasan bagi kepala madrasah dalam mengelola sumber daya manusia, mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta memastikan bahwa seluruh program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepala madrasah perlu memiliki strategi manajerial yang tepat agar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, terarah, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (Najiyulloh, 2026).

Daryanto, sebagaimana dikutip oleh Arifudin dan Kartika (2024), menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan memiliki wewenang untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian, serta semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sementara itu, Wahjosumidjo, sebagaimana dikutip oleh Kartika dan Arifudin (2026), memandang kepala madrasah sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki tugas kompleks dan menentukan arah perkembangan lembaga pendidikan. Tugas tersebut menuntut kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas madrasah. Berdasarkan pandangan tersebut, kepala madrasah dapat dipahami sebagai individu yang memperoleh amanah untuk memimpin dan mengelola lembaga pendidikan melalui kemampuan mengoordinasikan,

memengaruhi, membimbing, serta menggerakkan seluruh warga madrasah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu tanggung jawab penting kepala madrasah adalah memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Akhlak memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang tertib, harmonis, dan produktif. Penanaman nilai-nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian dan budi pekerti yang baik. Solih, Hadijaya dan Daulay (2025) menegaskan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter dalam mendukung pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia. Pendidikan karakter perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan budaya madrasah sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, kepala madrasah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan menyediakan layanan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan moral peserta didik secara seimbang.

Meskipun pendidikan karakter telah menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan, tantangan berupa kenakalan remaja, pergeseran nilai moral, dan kurangnya pemahaman terhadap etika pergaulan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan akhlak peserta didik tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga memerlukan pengelolaan lingkungan pendidikan yang mendukung terbentuknya perilaku positif. Keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu membangun sinergi dalam memberikan pengawasan, keteladanan, serta pembiasaan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing lembaga.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh sejumlah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis pesantren, adalah sistem pemisahan gender dalam kegiatan pembelajaran atau *single-sex classroom*. Kebijakan ini mengatur pemisahan peserta didik laki-laki dan perempuan dalam ruang atau pelaksanaan pembelajaran tertentu. Azizah *et al.* (2023) membahas kebijakan pembelajaran terpisah berdasarkan gender sebagai salah satu alternatif pengelolaan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Penerapan sistem tersebut dapat dilatarbelakangi oleh pertimbangan nilai-nilai keagamaan, tata tertib kelembagaan, kebutuhan pengelolaan kelas, serta upaya menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pemisahan gender juga dapat menjadi bagian dari penerapan norma pergaulan yang dianut oleh lembaga, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan hak peserta didik, kualitas pembelajaran, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang adil.

Fauzan dan Hafidz (2023) mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan belajar berbasis pemisahan gender ditemukan dalam praktik sejumlah lembaga pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai pesantren. Dalam konteks tersebut, pengaturan ruang belajar dan interaksi antara peserta didik laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari tata kelola pendidikan yang disesuaikan dengan norma dan ketentuan kelembagaan. Namun, keberhasilan penerapan sistem pemisahan gender tidak dapat hanya diukur dari terlaksananya pemisahan ruang atau kelompok belajar. Kebijakan tersebut juga perlu dievaluasi berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas interaksi antara guru dan peserta didik, ketersediaan sarana pendidikan, serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter. Dengan demikian, sistem pemisahan gender perlu dikelola secara terencana agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi benar-benar mendukung terciptanya proses pendidikan yang berkualitas.

Keberhasilan penerapan kebijakan pemisahan gender sangat berkaitan dengan kapasitas manajerial kepala madrasah. Sebagai pemimpin sekaligus manajer, kepala madrasah berperan dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, membagi tugas, mengatur sumber daya manusia, mengoordinasikan pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara berkala. Peran tersebut menjadi semakin penting apabila kebijakan pemisahan gender tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan tenaga pendidik. Pengelolaan yang melibatkan siswa dan tenaga pendidik memerlukan koordinasi yang jelas agar pembagian tugas, penempatan guru, penyusunan jadwal, pemanfaatan fasilitas, serta pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kepala madrasah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan lembaga tanpa mengabaikan kompetensi guru, kebutuhan belajar peserta didik, dan standar mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender menghadirkan kebutuhan manajerial yang tidak sederhana. Kepala madrasah perlu menyeimbangkan kepatuhan terhadap tata tertib lembaga dengan upaya mempertahankan efektivitas proses pembelajaran. Di satu sisi, kebijakan pemisahan gender harus dilaksanakan sesuai dengan nilai, visi, dan ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan. Di sisi lain, pengaturan tersebut harus tetap mendukung pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan kesempatan belajar yang setara, serta memastikan bahwa tenaga pendidik dapat menjalankan tugas profesionalnya secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang matang, pembagian tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan fungsi manajemen tersebut, kepala madrasah diharapkan mampu mengoptimalkan kebijakan pemisahan gender sebagai bagian dari sistem pengelolaan pendidikan yang terarah dan bertanggung jawab.

Konteks tersebut relevan untuk dikaji di Pondok Pesantren Al-Khoirot, khususnya pada Madrasah Aliyah (MA) Al-Khoirot. Sebagai lembaga pendidikan yang berada dalam lingkungan pesantren, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di MA

Al-Khoirot perlu dipahami dalam kaitannya dengan kebijakan, nilai, dan tata tertib yang ditetapkan oleh institusi induknya. Penerapan pemisahan gender bagi peserta didik dan pengaturan tenaga pendidik dalam sistem tersebut bukan semata-mata persoalan teknis pengelolaan kelas, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan kelembagaan diterjemahkan ke dalam praktik manajemen madrasah. Dalam hal ini, kepala madrasah memiliki posisi penting untuk menghubungkan ketentuan institusi dengan kebutuhan operasional pembelajaran, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran kepala madrasah sebagai manajer dalam optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana kepala madrasah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mengelola pemisahan gender pada peserta didik dan tenaga pendidik di MA Al-Khoirot. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi manajerial yang diterapkan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap menunjang efektivitas pembelajaran dan pembentukan akhlak peserta didik.

Penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Peran Kepala Madrasah sebagai Manajer dalam Optimalisasi Pembelajaran melalui Sistem Pemisahan Gender Siswa dan Tenaga Pendidik di MA Al-Khoirot." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya mengenai kepemimpinan dan pengelolaan pembelajaran berbasis kebijakan pemisahan gender. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala madrasah, tenaga pendidik, dan pengelola lembaga pendidikan dalam mengembangkan sistem manajemen pembelajaran yang terencana, efektif, sesuai dengan karakteristik kelembagaan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini diawali dengan studi kepustakaan *(library research)* melalui pengumpulan, reduksi, dan analisis kritis terhadap literatur, regulasi, serta dokumen relevan yang mendasari teori penelitian. Menurut Snyder (2020), studi literatur merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian terdahulu guna membangun pemahaman yang komprehensif terhadap suatu topik. Selanjutnya, penelitian ini diintegrasikan dengan metode studi kasus lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dengan

mempertimbangkan konteks kehidupan nyata. Data primer dihimpun melalui wawancara semiterstruktur bersama para informan kunci yang dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya terhadap fokus penelitian. Wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan sekaligus mengembangkan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil studi kepustakaan maupun transkrip wawancara, kemudian diorganisasikan, dikodekan berdasarkan tema, dan dianalisis menggunakan model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar hubungan antartema dan pola temuan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Tahap berikutnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan temuan lapangan, teori, serta hasil penelitian terdahulu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menafsirkan temuan berdasarkan perspektif teoretis yang relevan. Melalui rangkaian prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan yang kredibel, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kepala Madrasah dalam Menerapkan Sistem Pemisahan Gender pada Kelas dan Tenaga Pendidik di MA Al-Khoirot

Penerapan sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot merupakan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh institusi induk, yaitu Pondok Pesantren Al-Khoirot. Kebijakan ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan pendidikan pesantren yang mengatur pemisahan antara santri putra dan santri putri dalam berbagai aktivitas, termasuk kegiatan pembelajaran di madrasah. Dalam konteks sosiokultural, sistem pemisahan kelas berdasarkan gender telah diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan berbasis pesantren dan beberapa sekolah lainnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjaga norma pergaulan, serta mendukung konsentrasi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Mardin dan Kamal (2024) membahas keterkaitan penguatan pendidikan berbasis keislaman dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, kepala madrasah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan yayasan menjadi sistem pengelolaan pendidikan yang operasional. Pengelolaan kelas berbasis gender tidak hanya berkaitan dengan pemisahan ruang belajar antara peserta didik laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup pengaturan tenaga pendidik, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian

tugas, pengelolaan fasilitas, serta koordinasi kegiatan akademik. Oleh karena itu, kepala madrasah perlu memastikan bahwa seluruh komponen tersebut dikelola secara terencana agar kebijakan pemisahan gender dapat berjalan selaras dengan tujuan pembelajaran dan ketentuan lembaga.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, kepala madrasah perlu menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis. Amruddin *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan kelas berbasis gender mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan tersebut dapat dilengkapi dengan kegiatan monitoring, evaluasi, pemberian umpan balik, dan pelaporan agar pelaksanaan kebijakan dapat ditinjau secara berkelanjutan (Le & Nguyen, 2021). Pengelolaan sistem pemisahan gender memerlukan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi untuk memastikan bahwa pengaturan kelas dan tenaga pendidik tetap mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perencanaan merupakan tahap awal yang penting bagi kepala MA Al-Khoirot dalam menerapkan sistem pemisahan gender *(single-sex classroom)* bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Perencanaan tersebut disusun dengan mengacu pada kebijakan Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot sebagai institusi induk. Untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala MA Al-Khoirot, Gus Helmi Ali, S.Psi., pada 7 Juli 2026. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan dasar kebijakan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan sistem pemisahan gender sejak awal tahun ajaran sebagai berikut.

> "Terkait pemisahan gender ini, fondasi utamanya adalah kepatuhan terhadap amanah dan regulasi yang ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot. Sebagai lembaga formal di bawah naungan pesantren, kami di tingkat madrasah tidak berjalan sendiri. Dalam tahap perencanaan, kami menerjemahkan aturan yayasan tersebut ke dalam rancangan teknis akademis. Perencanaan kami fokuskan pada dua hal utama: pemetaan rombongan belajar (rombel) santri secara terpisah dan penataan distribusi jam mengajar tenaga pendidik agar linier dengan konsep pemisahan tersebut. Segala lini, mulai dari penyiapan dokumen kurikulum, jadwal pelajaran, hingga penempatan ruang kelas putra dan putri, disiapkan secara matang sebelum tahun ajaran baru dimulai." (Helmi Ali, 7 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan kepala madrasah dalam menerapkan sistem pemisahan gender bersifat integratif dan struktural. Artinya, kepala madrasah tidak menyusun kebijakan secara terpisah dari institusi induk, tetapi menerjemahkan ketentuan yayasan ke dalam perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan operasional madrasah. Hal ini terlihat dari adanya pemetaan rombongan belajar, penyusunan jadwal pelajaran, pengaturan

distribusi jam mengajar, penyiapan dokumen kurikulum, serta penempatan ruang kelas putra dan putri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berorientasi pada pemisahan peserta didik berdasarkan gender, tetapi juga memperhatikan kesiapan sistem pembelajaran secara keseluruhan. Kepala madrasah bertindak sebagai administrator sekaligus manajer yang menghubungkan kebijakan pesantren dengan pelaksanaan pendidikan formal. Dengan demikian, perencanaan yang sistematis menjadi landasan bagi pengorganisasian dan pelaksanaan sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot.

Pengorganisasian dan Pelaksanaan Pembagian Tugas Guru serta Penataan Kelas Putra dan Putri di MA Al-Khoirot

Pengorganisasian merupakan tahap penting dalam pelaksanaan sistem pemisahan gender karena berkaitan dengan pembagian tugas, penempatan tenaga pendidik, pengaturan fasilitas, dan penetapan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat. Di MA Al-Khoirot, kebijakan pemisahan gender bersumber dari ketentuan Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot. Kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada kegiatan pembelajaran formal, tetapi juga pada berbagai aktivitas pendidikan dan kepesantrenan. Pemisahan dilakukan pada lingkungan tempat tinggal santri, ruang kelas madrasah diniyah, ruang kelas pendidikan formal, serta kegiatan pesantren lainnya. Penerapan kebijakan tersebut terlihat dari penataan lokasi MA Al-Khoirot Putra dan MA Al-Khoirot Putri yang berada di kawasan berbeda. Berdasarkan data penelitian, jarak antara kawasan putra dan putri mencapai kurang lebih 300 meter. Fasilitas akademik yang tersedia terdiri atas 10 ruang kelas putra dan 10 ruang kelas putri. Setiap kawasan juga didukung oleh dua kantor operasional untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan administrasi. Selain itu, terdapat dua ruang laboratorium komputer yang berada di kawasan MA Al-Khoirot Putri.

Pengaturan ruang dan fasilitas tersebut memungkinkan kegiatan pembelajaran pada masing-masing kawasan diselenggarakan secara mandiri. Pemisahan tidak hanya diterapkan pada ruang fisik, tetapi juga pada penempatan tenaga pendidik yang bertugas di unit putra dan putri. Pengaturan ini menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan kelembagaan yang bertujuan menjaga konsistensi sistem pemisahan gender sebagaimana ditetapkan oleh yayasan. Dalam konteks pengelolaan pembelajaran, pemisahan kelas berdasarkan gender dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Melalui pengaturan tersebut, peserta didik diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus serta merasa nyaman dalam menjalani aktivitas pendidikan. Aditya, Haslan dan Yuliatin (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan kelas berbasis pemisahan gender dapat diarahkan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan sosial serta emosional peserta didik.

Kebijakan pemisahan gender di MA Al-Khoirot juga merupakan kebijakan kelembagaan yang disosialisasikan kepada kepala madrasah, tenaga pendidik, warga

madrasah, dan orang tua peserta didik. Berdasarkan keterangan kepala madrasah dalam data penelitian, penerapan sistem pembelajaran terpisah tersebut memperoleh dukungan dari orang tua yang memandangnya sebagai salah satu upaya untuk menjaga moral dan akhlak putra-putri mereka selama menempuh pendidikan. Dukungan tersebut menjadi salah satu unsur yang menunjang pelaksanaan kebijakan di lingkungan madrasah.

Berkenaan dengan pengorganisasian ruang belajar dan pelaksanaan pembelajaran yang terpisah, Gus Helmi Ali menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung pendidikan karakter di pesantren. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

> "Pemisahan total sejauh 300 meter ini bukan sekadar pembatasan fisik, melainkan bentuk ikhtiar kami untuk membangun ekosistem belajar yang fokus. Dengan memisahkan 10 kelas putra dan 10 kelas putri secara mandiri, lengkap dengan masing-masing 2 kantor manajemen dan jajaran guru yang berbeda, kami meminimalkan distraksi interaksi non-akademik antar lawan jenis. Bahkan untuk fasilitas seperti laboratorium komputer yang kebetulan berada di kawasan putri, alokasi penggunaannya telah dijadwalkan secara ketat dan rigid agar tidak terjadi percampuran *(ikhtilath)*. Semua tata kelola ini diturunkan langsung dari kebijakan yayasan agar manajemen di madrasah (MA) satu visi dengan visi besar pengasuh pesantren."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengorganisasian sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot dilaksanakan melalui pengaturan ruang, fasilitas, tenaga pendidik, dan penggunaan sarana pembelajaran. Penataan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pemisahan lokasi, tetapi juga mencerminkan upaya kepala madrasah dalam menyelaraskan pengelolaan pendidikan formal dengan kebijakan pesantren. Pengaturan laboratorium komputer, misalnya, memerlukan penjadwalan yang jelas agar fasilitas tersebut tetap dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tanpa mengabaikan ketentuan pemisahan gender. Pengorganisasian sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot menunjukkan adanya pembagian kawasan dan pengelolaan fasilitas yang disesuaikan dengan kebijakan lembaga. Kepala madrasah memiliki peran dalam memastikan bahwa pengaturan tersebut dapat dilaksanakan secara tertib dan tetap mendukung kegiatan akademik pada masing-masing unit.

1. Pengelompokan Kelas Berdasarkan Gender dan Jurusan

   Pengelompokan kelas merupakan bagian dari strategi pengorganisasian yang dilakukan untuk menyesuaikan penataan ruang belajar dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pembelajaran. Di MA Al-Khoirot, pengelompokan kelas tidak hanya didasarkan pada gender, tetapi juga mempertimbangkan jurusan atau peminatan yang tersedia, yaitu IPA, IPS, dan Keagamaan. Pengaturan tersebut diterapkan pada MA Al-Khoirot Putra maupun MA Al-Khoirot Putri dengan memperhatikan jumlah peserta didik dan kebutuhan

masing-masing kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MA Al-Khoirot, Gus Helmi Ali, S.Psi., pengelompokan kelas berdasarkan gender dan jurusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil akademik peserta didik serta kebutuhan penataan lingkungan belajar. Beliau menjelaskan:

> "Fokus utama kami dalam Manajemen Kelas Berbasis Gender di MA Al-Khoirot ini tidak hanya bertumpu pada pemisahan dan komposisi kelas berdasarkan gender semata. Pengelolaan tersebut kami integrasikan secara strategis dengan pengelompokan berdasarkan peminatan atau jurusan yang tersedia di setiap jenjang, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Keagamaan. Untuk pembagian kelas sesuai jurusan ini, kami ambil secara objektif dari hasil nilai akademik masing-masing siswa. Kebijakan ini kami terapkan secara konsisten, baik pada satuan pendidikan MA Al-Khoirot Putra maupun Putri, di man penentuan jumlah siswa per kelas disesuaikan secara proporsional guna mengoptimalkan proses penataan lingkungan belajar. Melalui pendekatan ini, kami dapat mendesain pengaturan layout ruang kelas, formasi tempat duduk, serta aksesibilitas alat bantu pembelajaran secara spesifik dan kondusif. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi interaksi sekaligus memenuhi kebutuhan akademis peserta didik sesuai dengan karakteristik gender, tingkat kemampuan kognitif, dan rumpun keilmuan yang mereka pelajari."

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelompokan kelas di MA Al-Khoirot dilakukan dengan mengintegrasikan dua pertimbangan utama, yaitu pemisahan gender dan pengelompokan berdasarkan jurusan. Penentuan kelompok belajar berdasarkan jurusan mempertimbangkan hasil akademik peserta didik, sedangkan penataan jumlah siswa per kelas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Pengaturan ini memberikan dasar bagi madrasah untuk menyesuaikan tata letak ruang kelas, formasi tempat duduk, dan penggunaan alat bantu pembelajaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak hanya berfokus pada pemenuhan ketentuan pemisahan gender, tetapi juga memperhatikan pengorganisasian kelas berdasarkan kebutuhan akademik. Dengan demikian, sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot diterapkan bersamaan dengan upaya menata lingkungan belajar agar sesuai dengan program peminatan dan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

2. Pembagian dan Penempatan Guru *(Teacher Placement)*

Penempatan guru merupakan unsur penting dalam pengorganisasian tenaga pendidik pada sistem pemisahan gender. Di MA Al-Khoirot, penempatan guru pada kawasan putra dan putri dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pemisahan gender yang berlaku di lingkungan pesantren. Lembaga mengutamakan penempatan guru laki-laki atau ustaz untuk mengajar di kelas putra dan guru perempuan atau ustazah untuk mengajar di kelas putri, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan karakter, aspek afektif, dan materi fikih yang spesifik gender. Penempatan tersebut juga dikaitkan

dengan pendekatan keteladanan *(role modeling)*. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Melalui pengaturan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebijakan lembaga, madrasah berupaya menciptakan proses pembelajaran yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan pesantren. Dalam pelaksanaannya, penempatan guru perlu disertai pembagian tugas yang jelas, penyesuaian beban mengajar, dan koordinasi antarpengelola unit putra dan putri. Hal tersebut diperlukan agar pemisahan tenaga pendidik tidak menghambat ketercapaian kurikulum maupun pemerataan layanan pembelajaran. Oleh karena itu, kepala madrasah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penempatan guru tetap mempertimbangkan kompetensi, kesesuaian mata pelajaran, dan kebutuhan akademik peserta didik.

3. Struktur Organisasi Staf dan Tata Usaha

   Selain mengatur tenaga pendidik, pengorganisasian sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot juga mencakup pengelolaan staf administrasi dan tata usaha (TU). Untuk menunjang kegiatan operasional, lembaga menerapkan struktur pengelolaan paralel dengan menempatkan staf administrasi pada unit putra dan unit putri secara terpisah. Masing-masing unit memiliki jalur pelayanan administrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pendidikan di kawasan tersebut. Pengorganisasian staf secara paralel bertujuan mempermudah koordinasi kegiatan administrasi harian, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan mendukung kelancaran pelayanan kepada peserta didik serta tenaga pendidik. Melalui pembagian tersebut, setiap unit dapat menjalankan kebutuhan administrasinya secara mandiri sesuai dengan kebijakan lembaga. Dalam konteks ini, kepala madrasah berperan mengoordinasikan pembagian tugas dan memastikan bahwa pelayanan administrasi di kedua unit berjalan dengan baik. Walaupun staf ditempatkan pada kawasan yang berbeda, koordinasi pengelolaan tetap diperlukan agar pencatatan data akademik, pelayanan administrasi, dan pelaporan kegiatan madrasah dapat dilaksanakan secara konsisten.

4. Pembagian Jabatan Pengelola dan Koordinasi Akademik

   Pemisahan fisik antara MA Al-Khoirot Putra dan MA Al-Khoirot Putri memerlukan koordinasi akademik agar penyelenggaraan pembelajaran pada kedua unit tetap mengacu pada standar kurikulum yang sama. Oleh karena itu, pengorganisasian jabatan pengelola menjadi bagian penting dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pendidikan. Di bawah koordinasi kepala madrasah, pengelolaan akademik melibatkan unsur fungsional, seperti kepala sektor atau wakil kepala madrasah bidang kurikulum pada masing-masing unit putra dan putri. Unsur tersebut bertanggung jawab membantu memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum nasional maupun kurikulum lokal berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas ini juga mendukung koordinasi terkait penyusunan jadwal pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pemantauan ketercapaian target akademik. Koordinasi akademik diperkuat

melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal yang melibatkan guru-guru berdasarkan rumpun mata pelajaran, seperti Keagamaan, IPA, dan IPS. Forum tersebut dapat digunakan untuk menyamakan persepsi mengenai materi pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan format yang digunakan, serta menetapkan indikator dan standar penilaian yang konsisten. Dengan koordinasi tersebut, pemisahan ruang dan tenaga pendidik diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan mutu pembelajaran antara unit putra dan putri.

Berdasarkan uraian tersebut, pengorganisasian dan pelaksanaan sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot mencakup pengaturan ruang kelas, pembagian kelompok belajar berdasarkan gender dan jurusan, penempatan tenaga pendidik, pengelolaan staf administrasi, serta koordinasi akademik. Kepala madrasah berperan mengintegrasikan seluruh unsur tersebut agar pelaksanaan kebijakan yayasan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan formal.

Upaya Kepala Madrasah dalam Mengoptimalkan Pembelajaran melalui Sistem Pemisahan Gender

Optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender merupakan upaya mengelola proses pendidikan agar tetap efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran meskipun peserta didik ditempatkan pada kelompok belajar yang terpisah berdasarkan gender. Zulaiha (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan kelas berbasis gender merupakan pengaturan dan pengelompokan peserta didik laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang efektif, nyaman, dan kondusif, sekaligus mengatur interaksi antara guru dan peserta didik. Pemisahan tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, praktik, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, serta bentuk interaksi sosial tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga.

Dalam pengelolaan kelas berbasis gender, kepala madrasah perlu memperhatikan berbagai tahapan manajerial. Karwati dan Priansa (2014), menguraikan tahapan pengelolaan kelas yang mencakup perencanaan kelas, pengorganisasian kelas, kepemimpinan kelas, dan pengendalian kelas. Sementara itu, Amruddin *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan kelas berbasis gender meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa optimalisasi pembelajaran tidak cukup dilakukan melalui pengaturan kelas semata, tetapi juga memerlukan kepemimpinan, pelaksanaan program, dan pengendalian yang berkelanjutan. Berdasarkan konteks MA Al-Khoirot, upaya optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender dapat dilihat dari beberapa aspek pengelolaan berikut.

1. Pengelompokan kelas sesuai gender dan jurusan. Kepala madrasah mengatur peserta didik berdasarkan gender sekaligus mempertimbangkan jurusan atau peminatan yang tersedia, yaitu IPA, IPS, dan Keagamaan. Pembagian tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil akademik dan jumlah peserta didik pada

masing-masing kelas. Pengaturan ini menjadi dasar dalam menyesuaikan lingkungan belajar dengan kebutuhan pembelajaran.

2. Penempatan tenaga pendidik sesuai dengan kebijakan lembaga. Penempatan guru laki-laki pada unit putra dan guru perempuan pada unit putri menjadi bagian dari pengelolaan tenaga pendidik yang mengikuti sistem pemisahan gender. Selain itu, pendekatan keteladanan diharapkan dapat mendukung pembinaan karakter dan perkembangan spiritual peserta didik. Agar tujuan pembelajaran tetap tercapai, penempatan guru perlu memperhatikan kompetensi dan kesesuaian bidang keahlian dengan mata pelajaran yang diampu.
3. Pengelolaan fasilitas pembelajaran dan penjadwalan kegiatan. Pemisahan lokasi MA Al-Khoirot Putra dan Putri mengharuskan pengaturan fasilitas yang terencana, termasuk ruang kelas, kantor operasional, dan laboratorium komputer. Penjadwalan penggunaan fasilitas perlu dilakukan secara jelas agar sarana pembelajaran dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan ketentuan lembaga.
4. Penguatan koordinasi akademik antara unit putra dan putri. Walaupun proses pembelajaran berlangsung pada kawasan yang berbeda, pelaksanaan kurikulum dan standar penilaian perlu dikoordinasikan agar mutu pendidikan tetap terjaga. Koordinasi melalui unsur pengelola kurikulum dan MGMP internal dapat membantu menyamakan persepsi guru, menyelaraskan perangkat pembelajaran, dan memantau ketercapaian kompetensi peserta didik.
5. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembelajaran. Kepala madrasah perlu memastikan bahwa kebijakan pemisahan gender tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mendukung efektivitas proses pembelajaran. Pengawasan dapat diarahkan pada pelaksanaan jadwal pelajaran, pembagian tugas guru, pemanfaatan fasilitas, kesesuaian pelaksanaan kurikulum, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan perbaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan sistem pemisahan gender.

Optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot berkaitan erat dengan kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sumber daya manusia, fasilitas, struktur organisasi, dan koordinasi akademik. Keberhasilan kebijakan tersebut perlu dinilai bukan hanya dari konsistensi pemisahan kelas dan tenaga pendidik, melainkan juga dari sejauh mana pengelolaan tersebut mendukung mutu pembelajaran, ketercapaian kurikulum, dan pembentukan karakter peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kepala madrasah sebagai manajer dalam optimalisasi pembelajaran melalui sistem pemisahan gender di MA Al-Khoirot, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah memiliki peran penting dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoptimalkan pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan kebijakan Yayasan Pondok Pesantren Al-Khoirot. Peran tersebut diwujudkan melalui perencanaan sistem pemisahan gender yang terintegrasi dengan kebijakan yayasan dan diterjemahkan ke dalam rancangan teknis akademik sebelum tahun ajaran baru dimulai. Perencanaan tersebut meliputi pemetaan rombongan belajar, penyusunan jadwal pelajaran, penempatan ruang kelas putra dan putri, serta pengaturan distribusi jam mengajar tenaga pendidik agar pelaksanaan pembelajaran berjalan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan lembaga.

Dalam aspek pengorganisasian dan pelaksanaan, sistem pemisahan gender diterapkan melalui pemisahan kawasan MA Putra dan MA Putri dengan jarak kurang lebih 300 meter. Masing-masing kawasan memiliki 10 ruang kelas dan dua kantor operasional, sedangkan penggunaan fasilitas pembelajaran, termasuk laboratorium komputer, diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pengorganisasian juga mencakup pemisahan penempatan tenaga pendidik, pengelolaan staf tata usaha secara paralel, serta koordinasi akademik antarpengelola. Penempatan ustaz pada kelas putra dan ustazah pada kelas putri menjadi bagian dari pendekatan keteladanan *(role modeling)* yang diarahkan untuk mendukung pembinaan karakter peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

Adapun upaya optimalisasi pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pemisahan gender dan pengelompokan peserta didik berdasarkan jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Keagamaan, dengan mempertimbangkan hasil akademik masing-masing siswa. Untuk menjaga konsistensi mutu pembelajaran pada unit putra dan putri, kepala madrasah mengoptimalkan peran unsur pengelola kurikulum serta forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran, materi, dan indikator penilaian. Dengan demikian, peran kepala madrasah sebagai manajer tidak hanya berfokus pada penerapan kebijakan pemisahan gender, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, dan koordinasi akademik. Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keterlaksanaan kurikulum, mendukung efektivitas pembelajaran, serta menunjang pembentukan karakter peserta didik di MA Al-Khoirot.

REFERENSI

Aditya, R., Haslan, M. M., & Yuliatin, Y. (2019). Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Gender (Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *6*(1). https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.90

Amruddin, S. P., Hari Nugroho, S. E., MM, M., Syarifuddin Sulaiman, S. E., Iljasmadi, S. E., NurWahyuni, S. E., ... & Seprianus, L. P. (2022). *Pengantar Manajemen (Konsep Dan Pendekatan Teoretis)*. Media Sains Indonesia.

Arifudin, O., & Kartika, I. (2024). Evaluasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Madrasah Ibtidaiyah. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, *2*(2), 560-575.

Azizah, I., Dewi, P. A., & Helty, A. (2023). Implementasi Pemisahan Kelas (Segregasi Gender) Peserta Didik dan Implikasinya Terhadap Motivasi Belajar di MTS N 4 Pasaman Barat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(5). https://doi.org/10.5281/zenodo.10426620

Fauzan, A. A. A., & Hafidz, H. (2023). Implementasi Segregasi Kelas Berdasarkan Gender Dalam Mengurangi Pergaulan Bebas Siswa. *Jurnal PAI Raden Fatah*, *5*(3), 586-602. https://doi.org/10.19109/pairf.v5i3.19914

Kartika, I., & Arifudin, O. (2026). Implementasi Kurikulum Cinta Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Karakter Siswa. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, *4*(1), 1-15.

Karwati, E., & Priansa, D. (2014). *Manajemen Kelas.* Bandung: Alfabeta.

Le, K., & Nguyen, M. (2021). How education empowers women in developing countries. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, *21*(2), 511-536. https://doi.org/10.1515/bejeap-2020-0046

Mardin, M., & Kamal, M. F. (2024). Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Kelas Berbasis Gender di MAS Darul Ulum Banda Aceh. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, *13*(2). https://doi.org/10.22373/ji.v13i2.27083

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.).* SAGE Publications.

Najiyulloh, B. M. (2026). *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MA Al-Khairiyah Way Lahu Tengkujuh Kalianda Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Snyder, H. (2020). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104,* 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Solih, M., Hadijaya, Y., & Daulay, N. K. (2025). Kebijakan Pemisahan Kelas Berbasis Gender Dalam Upaya Pembinaan Akhlak Siswa Di SMP Swasta IT Bina Insan Batang Kuis. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, *3*(5), 375-391. https://doi.org/10.33151/ijomss.v3i5.708

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.).* SAGE Publications.

Zulaiha, S. (2017). Urgensi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Inklusif Gender. *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, *4*(2), 86-106. https://doi.org/10.24042/terampil.v4i2.2219